

**FUNGSI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.sos)
dalam Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Oleh

RAHAYU WIDIASTUTI
NPM: 1441020039

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**FUNGSI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.sos)
dalam Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Oleh

RAHAYU WIDIASTUTI
NPM:1441020039

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I: Prof. Dr. H. M.A Achlami, HS, MA
Pembimbing II: Drs.Mansyur Hidayat, M.Sos.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M
ABSTRAK**

FUNGSI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

**Oleh
RahayuWidiastuti**

Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pembangunan dimulai dari tahap bawah yaitu desa. Pemerintah saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sudah termasuk dalam UU yang khusus mengatur pembangunan Desa. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut perlu dimobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Hadirnya BUMDES merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat.

Sehubungan dengan hal di atas, permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDES di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDES di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan beberapa penemuan data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata. Penulis mengambil data sampel dengan menggunakan purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang penulis berikan maka sampel berjumlah 6 orang. Alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data adalah hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDES dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan dibuka beberapa unit usaha yang juga merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, yaitu pengelolaan unit simpan pinjam, jual beli hasil bumi, dan unit sewa barang jasa. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru. Hasil dari penelitian ini adalah adanya BUMDES mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDES sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : *Fungsi BUMDES, Partisipasi Masyarakat.*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RahayuWidiastuti
NPM : 1441020039
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Fungsi BUMDES Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan**” adalah benar hasil karya penyusun atau penelitian sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka pertanggungjawaban pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Mei 2019

Saya yang menyatakan

Materai
Rp.6000,-

RahayuWidiastuti

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Fungsi BUMDES Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten
Lampung Selatan.**

Nama : Rahayu Widiastuti

NPM : 1441020039

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

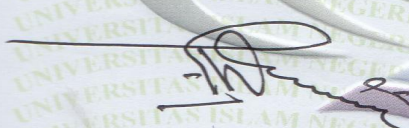
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

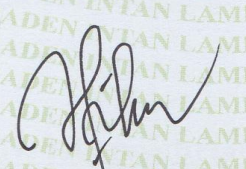
Pembimbing I

Bandar Lampung, Mei 2019
Pembimbing II


Prof. Dr. H. M.A Achlami, HS, MA
NIP. 195501141987031001


Drs. Mansyur Hidayat, M.Sos.I
NIP. 19650581719949031005

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam


H. Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I
NIP. 197306012003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat. Jl. Let.kol H. Endro Suratmin Sukaramel Bandar Lampung 35131 0721-703260

PENGESAHAN

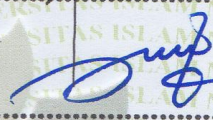
Skripsi dengan judul **“FUNGSI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”**, disusun oleh Nama: Rahayu Widiastuti, NPM: 1441020039, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan pada hari/tanggal: Selasa, 28 Mei 2019.

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang : H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I


(.....)

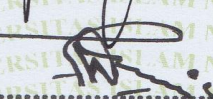
Sekretaris : Fiqih Satria, S.Kom., M.T.I


(.....)

Penguji I : Faizal, S.Ag., M.Ag


(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. M.A Achlami, HS, MA


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi





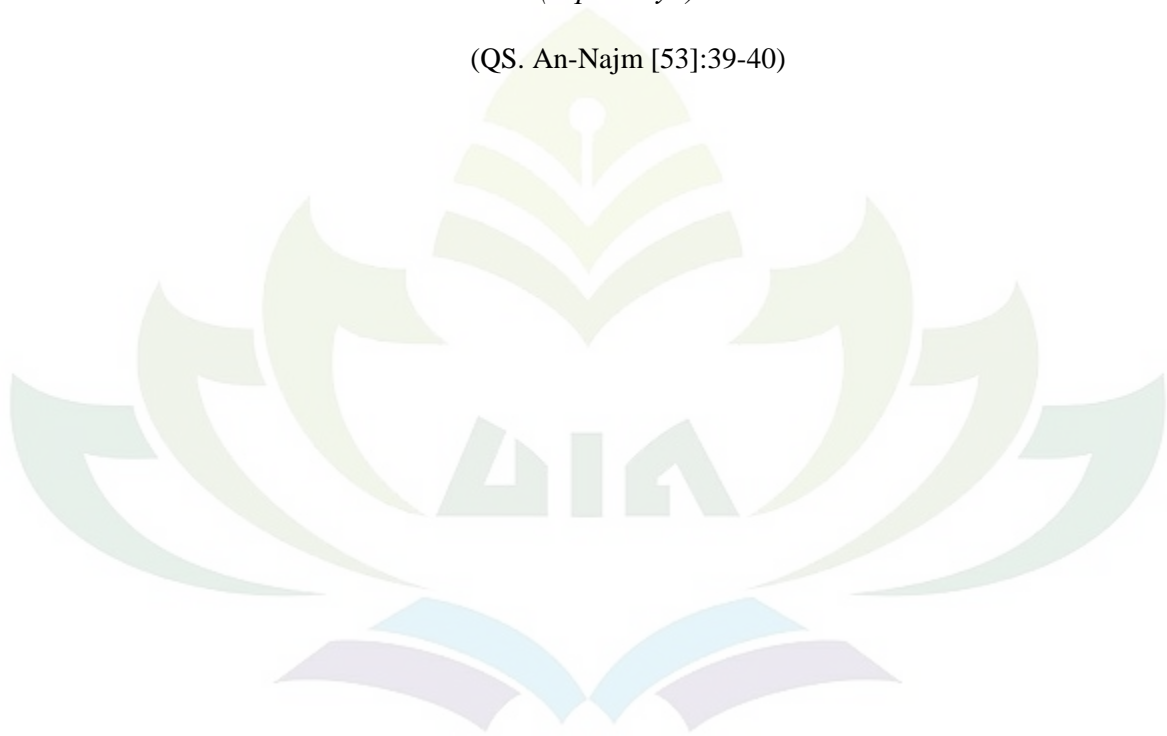
Prof. Dr. H. Khomsahjial Romli, M.Si
INIP.196104091990031002

MOTTO

﴿يُرَىٰ سَوْفَ سَعِيهِۦ ۖ وَأَنَّ سَعَىٰ مَا إِلَّا ذَنْبٌ لِّسَٰءَ وَأَنَّ﴾

Artinya: “ Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)”

(QS. An-Najm [53]:39-40)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucinta dan kusayang serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayah handa Kasimin dan Ibunda Mariyam tercinta yang telah berusaha memberikan segalanya demi keberhasilan dan cita-citaku dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku dengan cinta,kasih sayang dan do'a terimakasih atas bantuan, dukungan, kasih sayang yang begitu besar dan mulia sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Saudara dan saudariku, Kak Ano, Kak Alek Sumartin, Mbak Kartini, Mbak Mimin Endang Purwanti, Mbak Sri Handayani Novitasari, Mas Winarto,Mbak Tini, Mbak Kasiyati, Mas Agus, Mas Agus Nurwahit, yang telah memotivasi dan selalu mendo'akan kesuksesan saya.
3. Kepada sahabat-sahabat terbaikku Nurul Aini, Meguan Sari, Silvi Novriyanti yang tidak lelah memberi semangat, dorongan dan motivasi dari awal hingga skripsi ini selesai yang telah memberikan arti berbagi dan saling menyayangi.
4. Almamaterter cinta tempat menuntut ilmu, UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap RahayuWidiastuti dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 10 Februari 1996, anak ke 6 dari 6 bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Kasimin dan Ibu Mariyam. Pendidikan yang penulis tempuh adalah:

1. SDN 05Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tamat Pada Tahun 2008.
2. SMP Tunas Dharma Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Lulus Pada Tahun 2011
3. SMKN 05 Bandar Lampung Lulus Pada Tahun 2014.
4. Dan pada tahun 2014 diterima di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Raden Intan Lampung. Pada bulan Juli 2017 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Gunung Botol, Kec. Penengahan, Kab. Lampung Selatan.

Bandar Lampung, 2019

Penulis,

Rahayu Widiastuti

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FUNGSI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”**.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar S.Sos Atas terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih dalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut ikut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Khomsarial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang memberikan nasehat dan motivasi tidak hentinya kepada mahasiswa-mahasiswanya.
2. Ketua Jurusan PMI, H. Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I dan Sekertaris Jurusan PMI, Dr.M.Mawardi J, M.S.I yang telah membantu dan memberikan nasehatnya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. M.A Achlami, HS, MA sebagai pembimbing I dan Drs. Mansyur Hidayat, M. Sos.I sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan

bimbingan, nasehat dan motivasi serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung atasilmu yang telah diajarkan kepada kami.
5. Terimakasih kepada Aparat Desa, pengurus dan anggota BUMDes yang telah memberikanizin penelitian kepada penulis.

WaassalamualaikuWr.Wb

Bandar Lampung, 3 Mei2019

RahayuWidiastuti
NPM.1441020039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Metode Penelitian	16
G. Penelitian terdahulu	27

BAB II FUNGSI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Fungsi BUMDES dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa	30
1. Pengertian fungsi BUMDES dalam pemberdayaan ekonomi	30
2. Pengelolaan BUMDES untuk pemberdayaan ekonomi	32
B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	34
1. Pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat	34
2. Agen pemberdayaan ekonomi masyarakat.....	38
3. Prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat	39
4. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat	41
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDES	46
6. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat..	48

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SABAH BALAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Desa Sabah Balau.....	50
1. Sejarah Singkat Desa Sabah Balau	50
2. Kondisi Geografis Sabah Balau	52

3. Data Penduduk Kelurahan Sabah Balau	53
B. Gambaran Umum BUMDES Mulyo Sedoyo	58
1. Organisasi	58
2. Tujuan pembentukan BUMDES	59
3. Struktur kepengurusan	60
4. Jenis usaha BUMDES	60
C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDES	61
1. Pengelolaan BUMDES Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	61
2. Kegiatan usaha BUMDES dalam kegiatan pemberdayaan Ekonomi masyarakat	67
D. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pemberdayaan Ekonomi	70
1. Perencanaan	71
2. Pelaksanaan	72
3. Monitoring dan Evaluasi	72

BAB IV PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA SABAH BALAU MELALUI BUMDES MULYO SEDOYO

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes	74
B. Partisipasi Masyarakat Desa Sabah Balau Melalui BUMDes ..	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Kepala Desa Sabah Balau	52
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga	53
Tabel 3. Jumlah penduduk Berdasarkan Umur	54
Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	54
Tabel 5. Jumlah Sekolah Yang Ada Di Desa Sabah Balau	54
Tabel 6. Jumlah Umat Beragama Desa Sabah Balau	56
Tabel 7 Data Tempat Ibadah	57
Tabel 8 Mata Pencarian Penduduk Desa Sabah Balau	57
Tabel 9 Kepengurusan BUMDES Mulyo Sedoyo	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Maksud penulis menegaskan judul **“FUNGSI BUMDES DALAM PEMBERDAYAANEKONOMI MASYARAKAT DI DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”** adalah untuk menghindari adanya arah pemahaman yang membias dari maksud dan tujuan serta ruang lingkup pembahasan, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut sesuai yang penulis kehendaki.

Fungsi adalah kegunaan suatu hal, sedangkan secara istilah adalah konsep fungsional yang menjelaskan (fungsi) tugas seseorang dan dibuat sebagai dasar tugas yang nyata yang dilakukan seseorang¹. Fungsi merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jabatan maupun kedudukannya dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam sosiologi sendiri dipahami bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.²

Fungsi dalam skripsi ini adalah tugas pokok kelembagaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Tanjung Bintang Lampung Selatan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adanya BUMDes diharapkan masyarakat

¹Amrullah Ahmad, *Perspektif Islam Dalam Pemberdayaan Bangsa* (Yogyakarta: 1986), h.69.

²Suwarno, *Teori Sosiologi* (Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung, 2012), h.141.

Desa yang dibina dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mereka serta tidak mengalami ketergantungan terhadap perusahaan-perusahaan disekitarnya. Sehingga mampu mencukupi kebutuhan ekonominya secara mandiri. Tugas yang dilakukan oleh BUMDes dalam pemberdayaannya BUMDes membentuk program bersama dengan para anggotanya, dalam hal ini pengurus, anggota maupun masyarakat sudah berperan aktif dalam seluruh kegiatan pemberdayaan tersebut serta dapat memberikan solusi dan dapat mengentaskan permasalahan mereka sendiri sampai mereka mandiri.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dan program proyek pemerintah dan pemerintahan daerah³.

Pemberdayaan adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.⁴

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau

³UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Serta PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 61-62.

pemberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengenai masalah kemiskinan. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial serta mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan maniri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁵

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya memperkuat posisi ekonomi mikro yang dimiliki oleh keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup.⁶ Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kegiatan mengajak masyarakat untuk memberdayakan ekonomi dengan mengembangkan usaha melalui program BUMDes. Bila BUMDes benar-benar dijalankan secara aktif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Sabah Balau. Program pemberdayaan yang telah dijalankan adalah infrastruktur, pelayanan sosial dasar, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Mitra Usaha Desa, Pemberdayaan dan penelitian. BUMDes juga sebagai pendamping

⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung, PT Refika Aditama, 2010), Cet, Ke-4, h, 59-60.

⁶Hani Yuliwati, *Pemberdayaan Ekonomi Buruh Gedong Wanita, Jumlah Masyarakat Islam*(Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Suka, 2007). h. 110.

masyarakat dalam mengelola dana pengembangan usaha yang bertujuan untuk membantu dalam permodalan dalam bentuk simpan pinjam.⁷

Berdasarkan uraian di atas ditegaskan bahwa yang dimaksud judul tersebut adalah suatu proses kegiatan usaha lembaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan menciptakan partisipasi masyarakat, memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, serta dirancang oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung, Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam penulisan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi msyarakat merupakan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sangat penting, karena dalam prosesnya mengedepankan partisipasi masyarakat untuk bertindak memperbaiki kondisi perekonomian, sehingga memperkecil sifat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah namun masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola potensi desa dengan sebaik-baiknya.
2. BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat Desa. Keberadaan BUMDes di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dapat

⁷Medi, Sekertaris BUMDes Tanjung Bintang, Desa Sabahb Balau, *Wawancara*, (22 Februari 2018).

menggerakan kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih baik, dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuan melalui mobilisasi sumber daya alam dan potensi Desa lainnya.

3. Penelitian ini sangatlah relevan dengan jurusan yang diambil oleh penulis yaitu Pengembangan Masyarakat Islam. Secara Literature, lokasi penelitian serta waktu sangat terjangkau dan mendukung untuk dilakukan penelitian oleh penulis.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya dan subur. Kekayaan alam dan laut melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut mampu mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Setiap wilayah atau desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Secara umum, masyarakat pedesaan memiliki tingkat kehidupan dan kesejahteraan yang relatif tertinggal. Akan tetapi, dalam realita di masyarakat sangat terbatas sekali sarana serta prasarana yang mampu mendukung pemuda untuk membangun desa, dimana desa merupakan salah satu bagian dari fokus pembangunan nasional. Akhirnya, banyak masyarakat pedesaan yang lebih memilih untuk mencari penghidupan di wilayah perkotaan atau bahkan di negara lain, karena kurangnya daya dukung ekonomi di tempat tinggal asli mereka.

Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.⁸

Pembangunan basis ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama, namun tingkat keberhasilannya belum secara optimal tercapai. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. System dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Menurut Sumpeno, strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.⁹ Beberapa strategi yang secara umum diimplementasikan dalam membangun kemandirian desa antara lain: (1) membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis, (2) memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi

⁸Dita Angga Rusiana, *BUMDes Motor Penggerak Desa* (Ditulis Pada Tgl 24 Januari 2018), Terdapat di [Http://Ekbis.Sindonews.Com/Read/1174581/34/Bumdes-Motor-Penggerak-Ekonomi-Desa](http://Ekbis.Sindonews.Com/Read/1174581/34/Bumdes-Motor-Penggerak-Ekonomi-Desa) (diakses pada tanggal 5 february 2018).

⁹Wahjudin Sumpeno, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (Aceh: The World Bank, 2010),h. 8.

dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintah desa, (3) membangun system perencanaan dan penyelenggaraan desa yang responsif dan partisipatif, dan (4) membangun kelembagaan ekonomi local yang mandiri dan produktif. Akan tetapi pada hakikatnya, pembangunan pedesaan disana masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Padahal telah banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa program lainnya.

Saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan sehingga sangat menguntungkan dari pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masalah mengakibatkan banyak potensi diberikan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumberdaya kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014

tentang desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara dan bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya. Untuk mewujudkan desa yang mandiri diperlukan adanya strategi pembangunan. Diberlakukannya undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bias mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seperti kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based On Village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) pengembangan kelembagaan (2) pemberdayaan masyarakat (3) pengembangan ekonomi local dan (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan dengan didirikannya Lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).¹⁰

BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

¹⁰Kementrian Negara, *Perubahan Paradigm Pembangunan Daerah Tertinggal*terdapat di <http://www.kemenegpdt.go.id/>(diakses pada tanggal 6 februari 2018).

kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui optimasi daya serta peningkatan posisi yang dimiliki, dengan perkataan lain pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang sering kali mematikan kemandirian masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat oleh Slamet (2000) diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan oleh Mardikanto (2003) diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua individu, kelompok, kelembagaan, (stake holders) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan.¹¹

BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar ekonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah (*Bottom-up planning*) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai salah satu Lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus dimiliki

¹¹Totok Mardikantok, *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, CV. Abdi, 2012), h. 100.

perbedaan dengan Lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.¹²

Adapun tugas dan peran pemerintah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintahan kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk Pendidikan, pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah Desa Sabah Balau yang berada di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kasus ini, pendirian BUMDes Mulyo Sedoyo termasuk kedalam perencanaan pembangunan dari bawah (*Bottom-Up Planning*), hal ini karena BUMDes Mulyo Sedoyo tidak lagi didirikan atas dasar intruksi dari pemerintah, melainkan atas dasar inisiatif dari salah satu warga Desa yang ingin menggabungkan usaha-usaha Desa yang sebelumnya sudah ada agar dijadikan satu dalam sebuah Lembaga Desa, serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi warga desanya. Berdasarkan usulan warga tersebut kemudian perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan pemerintah Desa

¹²Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), h. 4.

mengadakan musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan tokoh masyarakat terkait Perencanaan pendirian program Desa tersebut. Dari musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dicanangkannya program BUMDes yang sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 78.

Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Namun diperlukan juga suatu badan usaha yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka perlu didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari desa seperti industry berbasis masyarakat, pertanian pertambangan, perkebunan, perdagangan, persiapan dan lain- lain.

Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Dinyatakan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal

3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat
4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat BUMDes juga didirikan untuk menekan berkembangnya sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. BUMDes merupakan pilar kehidupan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan simulan permodalan awal yang dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes.

Lokasi di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yakni tepatnya di Kecamatan Tanjung Bintang, Tanjung Bintang merupakan sebuah kecamatan yang memiliki beberapa desa kelurahan yang sebagian masih berada di wilayah yang memiliki beragam macam potensi pertanian, perdagangan, air bersih dan peternakan yang masih belum dikelola dengan optimal di kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. Desa sabah balau merupakan Desa yang dikenal

dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang baik pula. Desa sabah balau ini memiliki 5.098 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan mempunyai luas wilayah 700 Ha. Badan Usaha Desa Sabah Balau didirikan pada tanggal 27 februari 2015 badan usaha desa Sabah Balau kemudian diberi Nama Badan Usaha Milik Desa Mulyo Sedoyo atau biasanya disingkat dengan nama “BUMDes Mulyo Sedoyo” telah disahkan dan ditetapkan melalui peraturan desa.

BUMDes Mulyo Sedoyo sudah berjalan selama kurang lebih 3 Tahun belakangan ini tetapi masih terlihat adanya ketimpangan kesejahteraan di desa tersebut. Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa Mulyo Sedoyo yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa dan juga mensejahterakan masyarakat tetapi dalam dua tahun berdirinya Badan Usaha Milik Desa tersebut ternyata belum dapat mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di desa sabah balau.

Masalah mendasar yang menghadang mereka untuk melakukan usaha adalah terkait dalam keterbatasan permodalan, padahal banyak sebenarnya sumber-sumber modal yang bisa di dapatkan, namun tergantung dengan seorang tersebut berusaha bagaimana cara untuk mendapatkan modal. Untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan usahanya sehingga berjalan dengan lancar maka dibentuklah suatu wadah atau lembaga yang disebut BUMDes Badan Usaha Milik Desa dengan usaha-usaha yang bergerak didalamnya seperti unit simpan pinjam, adapun sumber modal awal BUMDes

bersal dari bantuan berupa hibah dari pemerintah dan kemudian ada penguatan modal yang sebagian berasal dari hibah bergulir (Usaha BUMDes sebelumnya).

Salah satu program BUMDes Mulyo Sedoyo dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu dengan pemberian modal usaha kepada masyarakat desa sabah balau untuk dikembangkan melalui usaha kecil menengah atau usaha yg bergerak dibidang pertanian, dll. Dalam hal ini tentu dapat memberi masukan tambahan bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan ulasan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulyo Sedoyo terhadap masyarakat serta untuk mengetahui permasalahan yang ada. Maka sengaja penulis mengangkat judul “FUNGSI BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Fungsi BUMDes Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat?
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes?

E. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Fungsi BUMDes Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- b. Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Pada tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal yang dimiliki desa. Serta dapat menjadi referensi dalam hal keilmuan pengembangan ekonomi masyarakat.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat Desa Sabah Balau agar lebih partisipatif dalam pemberdayaan dan pengelolaan potensi Desa guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid, maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang dipergunakan.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial.¹³ Secara terminologis, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya.¹⁴

Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes.

¹³Noor Juliansyah Dan Ahmad, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 34.

¹⁴*Ibid.*, h. 241.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membuat dekripsi atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁵

Menurut Irawan Suehartono, penelitian yang bersifat deskriptif ialah ialah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.¹⁶

Penelitian deskriptif ini ditunjang oleh Teknik perkumpulan data antara lain survey literatur dan pengalaman. Survey *literature* dilakukan untuk memperoleh sumber data primer yakni dari buku teks dan data sekunder anantara lain dari artikel jurnal, media cetak dan internet.

2. Populasi Dan Sempel

a. Populasi

Totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya, dinamakan populasi. Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik yang diteliti. Pengertian lain dari

¹⁵*Ibid.*, h. 3.

¹⁶Irawan Suehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung : PT, Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. 1, h. 35.

populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek yang dibatasi oleh kriteria tertentu.¹⁷

Adapun yang menjadi populasi adalah masyarakat Desa Sabah Balau dalam kegiatan BUMDesMulyo Sedoyo yaitu terdiri dari 3 orang pengurus BUMDes dan anggota BUMDes sebanyak 61 orang. Jadi total keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 64 orang.

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.¹⁸

Secara teknis penarikan dari sampel, Teknik yang digunakan *putposive sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menetapkan kriteria atau ciri-ciri dari populasi yang akan dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

¹⁷Sudarmayanti, Hidayat Syarifudin, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: CV,Mandar Maju, 2011), h.121.

¹⁸*Ibid.*,h.124.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung, Alfabeta CV, 2013), h. 301.

1) Pengurus BUMDes

Pemilihan sampel dalam hal ini ditetapkan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengurus BUMDes telah membantu segala urusan yang menyangkut BUMDes selama tiga tahun.
- b. Pengurus yang aktif serta dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsi dan tugasnya, mengetahui dan berpartisipasi aktif dalam perjalanan BUMDes, memiliki keterampilan dan cakap.

Berdasarkan kriteria di atas ditetapkan 3 orang pengurus BUMDes Sabah Balau.

2) Anggota BUMDes

Pemilihan sampel dari hal ini ditetapkan kriteria sebagai berikut:

- a. Anggota BUMDes yang telah memiliki usaha mikro.
- b. Anggota yang berperan aktif dalam kegiatan BUMDes di Kelurahan Sabah Balau.
- c. Anggota aktif selama 2 tahun.

Berdasarkan kriteria di atas makayang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pengurus BUMDes , dan 3orang anggota BUMDes Sabah Balau, jadi total keseluruhan sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 orang.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode interview

Interview atau wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas topik tertentu. Metode interview mencakup cara yang dipergunakan seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dengan seorang responden, dengan bercakap-cakap terhadap muka dengan orang tersebut.²⁰

Penulis menggunakan taktik interview dengan jenis *interview* bebas *terpimpin* yang merupakan kombinasi antara interview bebas dan *terpimpin*. Dalam melaksanakan interview, pewawancara menggunakan pedoman yang merupakan garis besar terkait hal-hal yang akan ditanyakan. Selanjutnya, cara bagaimana pertanyaan itu diajukan dan teknis wawancara diserahkan kepada kebijaksanaan pewawancara.²¹

Metode interview adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat satu sama lain dapat mendengarkan tanpa alat lain. Metode yang digunakan yaitu interview bebas *terpimpin* adalah kombinasi antara interview bebas dan interview *terpimpin* maksudnya, wawancara dilakukan dengan membawa membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci dan juga bebas menanyakan apa saja dan pertanyaan

22. ²⁰Koetjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta:PT, Gramedia Pustaka),h.

²¹Kartini Kartono, *Pengantar Metode Reseach* Cet. II (Bandung: Masdar Maju, 1996), h. 128.

dapat dikembangkan sesuai jawaban yang diberikan oleh responden.²² Interview dilakukan karena peneliti ingin mengetahui jawaban secara langsung diberikan oleh orang yang interview oleh soal-soal yang diajukan. Dengan metode ini akan mendapat jawaban yang lebih jelas, interview dilakukan terhadap pengurus dan anggota BUMDes dan juga warga masyarakat yang mendapatkan dana BUMDes yang berprofesi sebagai petani, juga pedagang. Interview dilakukan untuk menggali informasi tentang pengelolaan dana BUMDes.

b. Metode Observasi

Secara luas observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pernyataan.²³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi non-partisipan, maksudnya jika seseorang melakukan observasi (*observer*) tidak turut bagian dalam penghidupan objek atau orang-orang yang diobservasi (*observes*).²⁴

Jadi, dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi hanya berada diluar subjek yang diamati dan tidak diikuti dalam kegiatan-kegiatan. Metode observasi ini digunakan untuk menggali data terkait

²²Husaini Usman, *Metode penelitian sosial* (Bandung: Bumi Aksara, 1995), h. 189.

²³Irawan Soehartono, *Op.Cit.*,h. 69.

²⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 98.

aktifitas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan BUMDes Mulyo Sedoyo menjalankan kegiatannya bergerak dalam penguatan permodalan usaha ekonomi produktif dengan memberikan pinjaman modal yang jasa pinjamannya lebih ringan dibandingkan pihak atau bank konvensional lainnya, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi produktif dapat merasa lebih terbantu dalam hal permodalan untuk menjalankan usahanya tanpa terbebani oleh angsuran yang tinggi.

Penulis mengamati secara langsung, mencatat menganalisis pekerjaan yang dilakukan anggota BUMDes Mulyo Sedoyo, serta mengikuti kegiatan ketua kelompok dalam melakukan pendampingan kegiatan memberikan pinjaman modal dan jasa pada jadwal dan waktu yang ditentukan oleh anggota BUMDes Mulyo Sedoyo. Adapun yang di observasi adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, kegiatan pelatihan dalam pertemuan per-empat bulan satu kali oleh pengurus dan anggota BUMDes Mulyo Sedoyo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporan dan surat-surat resmi.²⁵ Data yang didapatkan bersumber dari dokumentasi tertulis yang resmi sesuai

²⁵Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 73.

dengan keperluan penelitian agar data yang didapatkan valid, konkrit dan objektif.

Kegiatan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data pendukung dalam melengkapi data-data terkait masalah penelitian yang penulis lakukan. Dengan dokumentasi menjadi bukti kebenaran penulis melakukan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian yaitu dengan membaca, mencatat data atau buku dari Dinas Sosial seperti buku Kegiatan BUMDes, Undang –Undang Pelaksanaan BUMDes, dan lain sebagainya.

4. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema, hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam Analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interprestasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.²⁶ Karena penelitian yang penulis bahas sifatnya deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran

²⁶*Ibid.*, h. 280.

tentang suatu gejala atau hubungan anatar dua gejala atau lebih.²⁷ Dalam penelitian ini analisis data yang penulis gunakan bersifat deduktif yaitu berfikir secara Makro-Mikro dengan mengurutkan masalah atau situasi sosial dari yang umum lalu dikerucutkan ke yang lebih kecil agar mudah dilihat akar permasalahannya seperti apa.

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.²⁸ Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data lapangan yang dilakukan secara *continue* yang diorientasikan secara kualitatif. Penulis melakukan penelitian dan menelaah secara dalam keseluruhan data yang dihimpun dilapanagn mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

b. Tahap Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara rumit dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema

²⁷ Irwan Soehartono, *Op.Cit.*, h. 35.

²⁸ *Ibid.* h. 37.

sentral dalam penelitian ini yaitu upaya kelompok BUMDes Mulyo Sedoyo dalam pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi desa Sabah Balau serta partisipasi masyarakat terhadap upaya tersebut dapat diketahui dengan mudah. Dan penulis dapat mengklarifikasikan topik masalah, mengkode, penyajian data sesuai dengan data lapangan dan teori yang penulis gunakan.

c. Tahap Verifikasi Data/ Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yang terpenting dalam penelitian ini adalah verifikasi data/penarikan kesimpulan. Verifikasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.²⁹

d. Keabsahan Data

Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data-data tersebut. Keuntungan

²⁹*Ibid.*, h. 131.

penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada Teknik pengamatan lapangan data triangulasi.

Penelitian melakukan triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari peneliti, serta mengcross cek data diluar subjek.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, hasil dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Angger Sekar Manikam. 2010. *Implementasi program Badan Usaha Milik Desa di desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009*. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, serta

literature dan studi pustaka yang melibatkan berbagai elemen masyarakat desa beserta pemerintah desa dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Badan Usaha Milik Desa ini belum berjalan dengan baik. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat desa masih rendah serta program-program Badan Usaha Milik Desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan potensi kehidupan petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDes tersebut tingkat partisipasi masyarakat desa masih rendah serta program-program Badan Usaha Milik Desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan, potensi serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian tersebut.³⁰

Abdul Qodir. 2011. *Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya)*. Dipublikasikan sebagai jenis jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial FISIPOL UI. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari peran lembaga lokal dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data yang deskriptif dan diperoleh melalui

³⁰ Angger Sekar Manikum, *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009* (Yogyakarta: 2010).

wawancara yang mendalam dengan para informan. Koprasri Jasa Keuangan (KJK) PEMK merupakan organisasi lokal yang dibentuk oleh masyarakat dan berada ditengah-tengah komunitas masyarakat kelurahan, namun belum menjadi sebuah lembaga lokal karena harus menempuh proses kelembagaan didalamnya.³¹

Agung Septian Wijanarko pada tahun 2012 yang berjudul *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Didesa Pandankrajan Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2012*. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengurus dan anggota BUMDes telah berperan baik, baik itu dalam segi permodalan maupaun dalam membantu menetapkan perekonomian masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto No. 18 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penelitian mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program BUMDes.³²

E.Journal yang ditulis oleh Dantika Ovi Era Tama Dan Yanuardi, M.Si yang berjudul Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari

³¹ Abdul Qodir, 2011, *Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya)* (Jakarta:2011).

³² Agung Septian Wijanarko Yang Berjudul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Didesa Pandankrajan Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2012*. (Semarang 2012).

Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes karangrejek telah berhasil memberi dampak positif bagi peningkatan-peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDes belum berjalan secara keseluruhan. Menggunakan teori dari Thomas Dye dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan peneliti yang mengamati pelaksanaan BUMDes.³³



³³E.Journal Yang Ditulis Oleh Dantika Ovi Era Tama Dan Yanuardi, M.Siyang Berjudul *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013.*

BAB II

FUNGSI BUMDES DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Fungsi BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

1. Pengertian Fungsi BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Fungsi dapat diartikan juga menunjuk pada proses yang akan berlangsung.¹Fungsi adalah kegunaan suatu hal, sedangkan secara istilah adalah konsep fungsional yang menjelaskan (fungsi) tugas seseorang dan dibuat sebagai dasar tugas yang nyata yang dilakukan seseorang.²

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu Lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka BUMDes perlu didirikan.

BUMDes menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan Lembaga ekonomi desa harus berperan mulai dari sector hulu (up-stream) sampai ke sector hilir (down-stream) dari aktivitas pengembangan perkebunan dan aktivitas ekonomi produktif lain yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan potensi local desa. Dengan

¹D.Hendro Puspito, Oc, *Sosiologi Sistematis* (Yogyakarta, Penerbit Karlus.1989),h. 179.

²Amrullah Ahmad, *Perspektif Islam Dalam Pembangunan Bangsa*(Yogyakarta:1989), h.69.

demikian, BUMDes yang professional, mandiri, dan memiliki jejaringan kerja yang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai upaya konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa mandiri dan otonom. Pendirian dan pengembangan BUMDes sebagai usaha konsolidasi perekonomian pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pemenuhan pasokan barang pokok, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi, dan mobilitas masyarakat memiliki akses bilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa. Potensi desa yang layak dikembangkan dan dikelola melalui BUMDes adalah sumber daya pedesaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, usaha -usaha masyarakat pedesaan yang secara persial belum terakumundasi dan terkendala oleh banyak hal seperti permodalan, pengelolaan hasil (industri pedesaan), pemasaran, dan lain-lain serta usaha-usaha yang belum oktimeal yang belum di eksplorasi.

Pendirian dan pengembangan BUMDes di pedesaan dimaksudkan untuk memfasilitasi desa menjadi desa yang otonom dan mandiri. Pembentukan BUMDes akan menjadi instrument pembentukan dan peningkatan pendapatan asli desa (PADesa). Pembentukan dan peningkatan PADesa akan menjadi modal dan pembentukan kegiatan-kegiatan pembangunan melalui prakarsa local (desa), sehingga secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah, pemerintah profinsi, dan pemerintah daerah.³

³Amir Syamsudin, UUD Republik Indonesia No. 6Tentang Desa Tahun 2014.

Tugas dan fungsi BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai Lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai Lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai Lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang – undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan berusaha mengetahui dan merumuskan permasalahan.⁴

2. Pengelolaan BUMDes Untuk Pemberdayaan Ekonomi

a. Kepengurusan

Pengamatan peneliti kepada Pengurus BUMDes sangat positif dan terbuka. Ditambah dengan mudahnya menemui seluruh Pengurus BUMDes yang dinilai akan berdampak dan suksesnya pengelolaan BUMDes sesuai dengan ekonomi masyarakat yaitu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip pemberdayaan.

⁴Syarif Hidayatullah, Universitas Jember.

b. Asas dan Tujuan

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yaitu jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dalam rangka menuntaskan persoalan kemiskinan, memberikan bantuan sosial dan, keadilan dalam kegiatan perekonomian, stabilitas ekonomi dan pertumbuhan dalam mengangkat derajat manusia dari kehidupan terbelakang dalam segala aspek. Adapun tujuan dari BUMDes Mulyo Sedoyo adalah : menetapkan kelembagaan perekonomian desa, menciptakan kesempatan berusaha, mendorong peran pemerintahan desa dalam menanggulagi kemiskinan, meningkatkan pendapatan asli desa, membuka lapangan kerja.⁵

c. Peminjam

Pengelolaan barang dan modal dengan perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan pemeliharaan, investasi perubahan stastus hukum barang BUMDes ditetapkan oleh pengurus setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina dengan penuh tanggung jawab, tidak mementingkan pribadi dan penuh pertimbangan. Hal ini sesuai dengan etika ekonomi yaitu keseimbangan, tidak berlebihan-lebihan, keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan sosial.⁶

⁵Medi, Skertaris BUMDes, Wawancara 15 september 2018

⁶M. Ismail Yusanto dan M.Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam (Bogor: Al-Azhar Press, cet 2, 2011), h. 69.

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Secara konseptual, suatu pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan).⁷ Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris *empowerment*, yang secara harfiah bias diartikan sebagai “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. *Empowerment aims to increase the power of dis-advantaged.*⁸

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, serta mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁹

⁷Edi Suharto, *Membangunmasyarakat Memberdayakan Masyarakat*(Bandung:PT. Refika Aditama, 2010), Cet. 4, h. 57.

⁸Alfiri, *Community Devolopment*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 22.

⁹Edi Suharto, *Op.Cit.*, h. 59-60.

Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi-tawar) agar masyarakat semakin mandiri. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan.¹⁰

Imang Mansur Burhan mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya membangkitkan potensi umat islam ke arah yang lebih baik, baik dalam kehidupan sosial, politik maupun ekonomi. Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.¹¹

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme

¹⁰Totok Mardiantok, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Public* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.69.

¹¹Onny S. Prijono, A.M.W Pranaka, *Mengenal Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), h. 48.

untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety need*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa lalu.¹² Dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan, yaitu:

- a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin dalam berdaya memanfaatkan peluang.
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.¹³

Ada empat konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

¹²Totok Mardikanto, *Op. Cit.* h.39.

¹³Gunawan Sumodiningrat, *Memberdayakan Masyarakat* (Jakarta: Pena Kencana Nusadwipa. 1996), h. 65-68.

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme yang benar. Karena pengembangan ekonomi masyarakat adalah kendala structural, maka pemberdayaan rakyat harus dilakukan melalui perubahan structural.
- c. Perubahan structural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi subsiten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan menjadi mandiri.
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya meningkatkan produktifitas dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang era tantara yang telat maju dengan yang masih lemah yang belum berkembang.¹⁴

Permasalahan lain pada era reformasi dan situasi krisis ekonomi yang saat ini mendera Indonesia yang entah kapan akan berakhir, pemberdayaan yang digulirkan lebih kuat diwarnai oleh perspektif politik ekonomi dari pada perspektif sosial budaya. Ini terlihat jelas dengan adanya usaha untuk memobilisasi masyarakat dengan memanfaatkan sumber yang datang atas

¹⁴Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung, Humaniora, 2006), h. 135.

kepentingan politik tertentu dan memperhatikan keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan kurang memberikan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan inisiatif masyarakat. Penumbuh kembang perilaku masyarakat yang telah berdaya guna itu harus didukung oleh program-program pengenyataan orientasi, motifasi, dan pelunasan mantra, pengambilan keputusan oleh masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi rakyat, tapi juga peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga diri, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.

2. Agen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Chamber, individu yang diberdayakan adalah orang miskin yang seringkali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah dilumpuhkan. Oleh karena itu dalam pemberdayaan dibutuhkan peran orang luar. Orang asing yang bertugas memberdayakan ini adalah kalangan petugas pembangunan baik formal maupun non-formal. Petugas formal adalah aparatur pemerintah yang bertugas dikalangan, seperti: pegawai kelurahan/desa, penyuluh, guru, dosen, pegawai pukesmas, bidan, dan profesi lapangan lainnya. Petugas nonformal adalah inividu yang mamiliki dedikasi secara sukarela untuk mambantu pemberdayaan masyarakat baik yang dikelola oleh suatu Lembaga (LSM) atau aecara pribadi. Petugas non-

formal tersebut diantaranya: relawan, pekerja sosial, kader PKK, kader posdaya, mahasiswa, ulama, simpatisan, dan yang lainnya.

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku menuju kearah kemandirian (berdaya).Perubahan perilaku ini baik aspek pengetahuan, sikap, namun ketrampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya.¹⁵

3. Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat menghindari beberapa prinsipn pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan dilakuan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, potensi klien/sasaran.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelak dalam kegiatan pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menmbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan local yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.
- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

¹⁵Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h.55.

- f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan.
- g. Pemberdayaan tidak bias dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistic terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- h. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendorong kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar belajar sepanjang hayat (lifelong learning/education).
- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya.
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya.
- l. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
- m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.
- n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat.¹⁶

¹⁶Ibid., h. 58-60.

4. Konsep pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan menunjukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.¹⁷

Menurut Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan-nya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.¹⁸ Maka secara operasional pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses memampukan dan memandirikan masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki agar tidak ketergantungan dengan pemberian pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan, apabila dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat bukannya meningkatkan produksi. Konsep ini mengubah prinsip yang selama ini dianut, yaitu bahwa pencapaian

¹⁷Totok Mardikanto, *Op.Cit* h. 61

¹⁸Jim Ife, *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (Meulbore: Addison Wesley Longman, 1997),h. 182.

pembangunan lebih diarahkan pemenuhan target-target variable ekonomi makro. Upaya untuk mewujudkan tujuan ini, antara lain berupa pembentukan bentuk usaha kemitraan yang mutualisis antara orang local dengan orang-orang yang lebih mampu.

Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah:

- a. Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat ddiberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
- b. Tahap pengkapasitasan (*capacity bulding*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan, ketrampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
- c. Tahap pendayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.¹⁹

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah: program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, nuta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumber daya local, senditif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan,

¹⁹Ayub M. *Padangaran, Op.Cit.*, h.31-32.

tidak menciptakan kebergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.²⁰

Aktivitas LSM dalam menangani kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena kegiatan pengembangan masyarakat pada awalnya memang berfokus pada pencapaian target perubahan kuantitatif yang diindikasikan dengan tersedianya sarana fisik dan perbaikan tingkat kehidupan material. Namun hal tersebut direalisasikan dengan perubahan target kuantitatif ini sebagai modal awal menuju proses perubahan kualitatif yang ditandai dengan terbedayakannya masyarakat.²¹

a. Modal Sosial Dalam Suatu Pemberdayaan Masyarakat

Modal sosial dalam suatu masyarakat yang menjadi perekat antara kelompok masyarakat yang satu dan yang lainnya. Modal yang dimaksud disini adalah norma dan peraturan yang mengikat warga masyarakat yang berada didalamnya, dan mengatur pola perilaku warganya, juga unsur kepercayaan (trust) dan jaringan (net-working) antar warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Norma dan aturan yang ada juga mengatur perilaku individu yang baik. Dalam perilaku ke dalam (internal kelompok) maupun perilaku luar (eksternal, hubungan dengan kelompok masyarakat yang lain).

²⁰*Ibid.*, h. 62.

²¹Zubaedi, *Op.Cit.*, h. 72.

Terkait dengan perilaku warga masyarakat didalam dan antar kelompok, ada tiga acam bentuk modal sosial, yaitu:

- 1) Bonding capital yang merupakan modal sosial yang mengikat anggota mengikat anggota masyarakat dalam satu kelompok tertentu.
- 2) Bridging capital yang merupakan salah satu bentuk modal sosial yang menghubungkan warga masyarakat dari kelompok sosial yang berbeda.
- 3) Lingking capital yang merupakan suatu ikatan antara kelompok warga masyarakat yang lemah dan kurang berdaya, dengan kelompok warga masyarakat yang lebih berdaya, (*powerful people*), misalnya bank, polisi, dan sebagainya.²²

b. Tahapan- Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut pendapat Tim Deluvery tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat adalah:

- 1) Seleksi lokasi
- 2) Sosialisasi pemberdayaan masyarakat
- 3) Proses pemberdayaan masyarakat
 - a) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya.
 - b) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian meliputi: memprioritaskan dan menganalisis maslaah-masalah,

²²Isbandi Rukminto Adi, *Op.Cit.*, h. 308-309.

identifikasi alternative pemecahan masalah yang terbaik, identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah, pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaan.

- c) Menerapkan rencana kegiatan kelompok, rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi diri pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang kongrit dengan tetap memperhatikan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan itu adalah, pemantauan pelaksanaan dan kamajuan kegiatan menjadikan perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.
- d) Membantu proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisiatif (participatory monitoring and evalution/PME). PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.
- e) Pemandirian masyarakat.²³

c. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Pada perkembangan terakhir banyak diterapkan beragam metode pemberdayaan masyarakat “partisipatif” berupa:

- 1) FGD (*fokus group discussion*) atau diskusi kelompok yang terarah.

²³Totok Mardikanto, *Op.Cit.h.* 125-126.

Pelaksanaan FGD dirancang sebagai diskusi kelompok terarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan suatu program, melalui diskusi yang partisipatif dengan dipandu atau difasilitasi oleh seorang pemandu dan seringkali juga mengundang nara sumber.

2) SL atau Sekolah Lapangan (Farmers Field School/FFC)

SL atau FFS diterapkan pada perlindungan hama terpadu, karena itu kemudian dikenal dengan istilah Sekolah Lapang Perlindungan Terpadu (SLPHT). Sebagai metode pemberdayaan masyarakat, SL/FFS merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagai pengalaman (sharing), tentang alternative dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sebagai suatu kegiatan belajar bersama, SL/FFS biasanya difasilitasi oleh fasilitator atau nara sumber yang berkompeten.²⁴

5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan

²⁴*Ibid.*, h. 201-204.

perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi. Desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBdes).

Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi local dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa yang berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (masyarakat ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam melakukan berbagai inovasi pembangunan.

Pendampingan terhadap masyarakat Desa penting dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.²⁵ Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran

²⁵Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa.

strategis dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan professional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pada prinsipnya, pendirian BUMDesa merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Maka strategi pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa antara lain.

- a. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntunan hajat hidup masyarakat desa.
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

BUMDes memiliki tugas untuk meningkatkan pendapatan Desa dan memobilisasi potensi desa melalui pembentukan Desa sebagai objek wisata. Dimana akan menjadi strategi dalam meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dengan memobilisasi potensi Desa dengan cara menjadikan Desa sebagai Desa yang berdaya.

6. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemberdayaan Ekonomi

Istilah partisipasi dan partisipatoris adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya

pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri.²⁶ Tentang hal ini, perlu dilakukan upaya penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan untuk menumbuhkan kemampuan, menunjukan adanya kesempatan, dan membantu upaya peningkatan kemampuan untuk berpartisipasi. Pelaksanaan penyuluhan tersebut harus dibarengi upaya menyakinkan bahwa partisipasi yang akan dilakukan oleh masyarakat itu akan memberikan manfaat (ekonomis dan non-ekonomis) dengan tingkat tahapan yang sangat tinggi, baik langsung maupun tidak langsung.²⁷ Sesuai dengan pendapat *Van de Ban* yang

menyatakan beberapa alasan yang mendasari perlunya partisipasi masyarakat :

- 1) Masyarakat mempunyai informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang berhasil, termasuk tujuan, situasi, pengetahuan, serta pengalaman dengan struktur sosial masyarakat.
- 2) Masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerjasama dalam program pemberdayaan, jika ikut bertanggung jawab didalamnya.
- 3) Pada masyarakat yang demokratis mereka berhak terlibat dalam keputusan mengenai tujuan yang ingin dicapai.²⁸

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat.²⁹

²⁶*Ibid.*, h. 106.

²⁷Totok Mardikanto, *Op.Cit.*, h 98-99.

²⁸Agus Sjafari, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*(Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 150.

²⁹Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung:Humaniora Utama, 2001), h.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SABAH BALAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Desa Sabah Balau

1. Sejarah Singkat Kelurahan Sabah Balau

Tedengar cerita daerah pedesaan yang subur, tumbuhan yang hijau, di atas tanah yang di tumbuhi pohon dan semak lebat,hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun dalam keadaan primitive,desa "SITI REJO" orang menyebutnya. 3 Km dari kota Bandar lampung. Konon desa siti rejo merupakan pemekaran dari Desa suwaluh dan sampai saat ini letaknya di sebelah utara dari siti rejo.

Desa SITI REJO lama kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa itu.tak salah lagi desa siti rejo sudah terkenal di kalangan penduduk desa sekitar bahkan sampai ke luar kota.konon cerita di desa ini di huni sebangsa mahluk halus yang menyerupai anak kecil mencari yuyu (sejenis kepiting) dan katak pada malam hari,anehnya dari kepala orang ini keluar api yang menyala nyala bagaikan obor (seperti jangkitan).mahluk ini menampakan pada malam hari.dari hari kehari tersebar keseluruh tetangga desa banyak orang penasaran atas cerita ini sehingga tidak sedikit orang yang ingin membuktikanya.karena kegemparan cerita ini sehingga nyampai ke telinga

pejabat.tak hayal lagi para pejabat pada saat itu ingin membuktikanya beserta para punggawanya.

Waktu menyaksikan telah tiba,setelah ba'da magrib menjelang tengah malam rombongan menyaksikan apa yang mereka liat?mereka meliat sendiri beberapa anak kecil di ubun ubun kepalanya keluar api bagai obor sedang mencari makan.para punggawa tidak percaya dengan pemandangan ini,mereka terancam dan takut atas kejadian yang di lihatnya,akhirnya mereka melepaskan tembakan ke arah mahluk itu.yang anehnya bukan malah mati mahluk itu berubah menjadi banyak sehingga memenuhi 1 petak sawah.tidak percaya dengan kejadian itu para punggawa melepaskan tembakan ke dua,punggawa terperanjat janggitan yang memenuhi satu petak pertama bertambah jadi banyak lagi dan tak terhitung.akhirnya di hamparan sawah yang gelap gulita berubah menjadi terang oleh cahaya janggitan itu.

Setelah kejadian itu Desa SITI REJO makin termasyur namun bukan siti rejonya tetapi kata janggitan (SABAH BALAU) yang identik dengan mahluk halus (Hantu).kepopuleran sabah balau menenggelamkan nama Desa SITI REJO sehingga oleh para pejabat pada saat itu desa siti rejo di ganti dengan nama Desa SABAH BALAU.Tradisi yang muncul setiap tahun era perubahan menghapus mitos mahluk seram yang bernama sabah balau,yang konon mengeluarkan api di kepalanya yang menyebabkan daerah tersebut menjadi terang bederang karena mahluk aneh tersebut.

Tapi kenyataan itu sekarang sudah berubah, justru para warga sabah balau yang di motori oleh para perangkat desa, tokoh masyarakat dan pemuda, bersatu untuk mengubah sabah balau menjadi ikon baru yang terang benderang di era modern. Dan benar dari diskusi seluruh elemen masyarakat dapat mengubah imige yang dulu membodohkan dan bersifat menakut nakuti akhirnya terjawab oleh para profesional muda untuk menciptakan brand baru Sabah Balau yang semula terang karena mahluk aneh di rubah terang benderang dengan gebyar kembang api dalam setiap ulang tahun Desa Sabah Balau dan program 300 lampu di seluruh penjuru Desa Sabah Balau. Dengan demikian terang benderanglah desa Sabah Balau di era modern

Nama-nama kepala desa sabah balau sebelum dan sesudah berdirinya desa sabah balau Sebagai Berikut:

Tabel 1
Daftar Kepala Desa Sabah Balau

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MEMERINTAH
1.	H.DUL HURIP	Sebelum tahun 1927
2.	H.MADIAN	-
3.	NAWAWI	-
4.	BAHARUDIN	1940 -1945
5.	IBRAHIM NUR	1945-1950
6.	M.AZIZI	1950-1972
7.	M.TOHIR	1972-1988
8.	ASWANURI	1988-1998
9.	SUKARNEN.WD	1998-2013
10.	MISYANTO	2013-2019

Sumber Data: Profil Desa Sabah Balau

2. Kondisi Geografis Kelurahan Sabah Balau

- a. Letak geografis Desa Sabah Balau merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Dengan batas-batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Way Huwi dan Way Galih
 Sebelah Selatan : Kelurahan Sukabumi Dan Sukarame
 Sebelah Barat : Kelurahan Sukarame Dan Harapan Jaya
 Sebelah Timur : Desa Sukanegara, Way Galih, dan Lematang

- b. Iklim

Curah Hujan : 2000-3500 mm
 Hujan Bulan : 6 bulan
 Suhu rata-rata Harian : 24-30 °C
 Bentang Wilayah : Datar/bukit

- c. Luas wilayah 700 Ha, dengan jenis tanah

Pekarangan	: 192 Ha	Perkebunan	: 250 Ha
Hutan Desa	: 85 Ha	Sawah	: 40 Ha
Area Publik	: 25 Ha		

3. Data Penduduk Kelurahan Sabah Balau

Berdasarkan pemutakhiran data pada Bulan Mei 2016, Desa Sabah Balau mempunyai jumlah penduduk 5.098 jiwa, terdiri dari 2.713 jiwa laki-laki dan 2.385 jiwa perempuan yang tersebar di 35 Rt dan 7 Dusun yang ada di Desa Sabah Balau dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga

Nama Rt	Nama Dusun	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
07	Dusun 1a	123	400	500	900
05	Dusun 1b	120	395	300	695
07	Dusun 1c	98	605	168	773
06	Dusun 2a	274	321	158	479
07	Dusun 2 b	136	424	623	1.047
05	Dusun 3 a	87	312	423	735
05	Dusun 3 b	127	256	213	469

Sumber: Monografi Desa Sabah Balau

Desa sabah balau memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, daftar menurut usia pada tahun 2016 adalah usia 0-4 tahun berjumlah 287 jiwa, 5-6 tahun berjumlah 160 jiwa, 7-12 tahun 217 jiwa, 13-15 tahun berjumlah 420 jiwa, 16-18 tahun berjumlah 390 jiwa, 19-25 tahun berjumlah 604 jiwa dan 26-64 tahun berjumlah 2711 jiwa dan usia 65 tahun 309 jiwa. Adapun table jumlah penduduk desa sabah balau berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah penduduk Berdasarkan Umur

Umur	0-4	5-6	7-12	13-15	16-18	19-25	26-64	65	Total
Jumlah	287	160	217	420	390	604	2711	309	5098

Sumber : monografi desa sabah balau

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Desa Sabah Balau yaitu 5,089 jiwa memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Mayoritas pendidikan masyarakat Sabah Balau rata-rata tamat sampai dengan SMA dengan jumlah 2303 jiwa, kemudian lulus SMP 1501 jiwa, lulusan S1 20 jiwa. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah Penduduk	Jenis Pendidikan					
	SD/MI	SMP/MTs	SMU/MA	SI/Diploma	Tidak Tamat	Buta huruf
5098	505	1501	2303	20	569	200

Sumber : monografi desa sabah balau

Tabel 5 Jumlah Sekolah Yang Ada Di Desa Sabah Balau

NO	Nama Pendidikan	Jumlah sekolah	Lokasi/Dusun
01	TK/PAUD	-05	1c,1c,2b,3a,3b
02	SD/MI	-03	-1b,2b,3a
03	SMP/MTs	-01	-
04	SMA/MA	-	-
05	Lain-lain	-	-

Sumber : Monografi Desa Sabah Balau

a. Kondisi Sosial Dan Keagamaan Desa Sabah Balau

Berdasarkan hasil observasi termasuk dengan melakukan interview terhadap Tokoh Masyarakat setempat, Desa Sabah Balau mayoritas dipenuhi oleh penduduk beragama islam. Adapun gambaran kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Desa Sabah Balau adalah sebagai berikut :

1) Derajat kesehatan

Angka kematian bayi dan ibu relative kecil, dikarenakan posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin melakukan kegiatan pelayanan untuk pemeriksaan dan pengobatan. Desa sabah balau juga sudah memiliki puskesmas sendiri, keberadaannya sangat dekat dan strategis, untuk itu sangat mudah

diakses masyarakat. Selain puskesmas, juga ada bidan desa yang memberikan pelayanan kesehatan kepada warga, dan adanya posyandu di tiap-tiap Dusun Sabah Balau yang membantu dalam pelayanan warga terkait dengan masalah kesehatan.

2) Kegiatan keagamaan

Kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat Desa Sabah balau adalah pengajian. Pengajian dilaksanakan setiap malam sabtu setelah sholat isya'. Dalam pengajian tersebut, terdapat beberapa rangkaian acara, diantaranya sholawat, tawassul, siaran rohani dan juga ada penggalangan dana untuk anak-anak yatim. Kegiatan rutin tidak hanya sebagai bentuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Akan tetapi dengan adanya kegiatan pengajian ini dapat meningkatkan tali silaturahmi antar warga. Masyarakat juga sering mengadakan acara pengajian untuk memperingati Hari Besar Islam setiap tahunnya dan mengundang ibu-ibu masjid lainnya.¹

Masyarakat Desa Sabah Balau merupakan masyarakat majemuk yang berasal dari berbagai suku baik suku jawa, sunda, dan lampung. Meskipun beragam suku, dan agama, masyarakat desa sabah balau sangat toleransi dan tenggang rasa antar sesama.

¹Ibu Win, Ketua Majelis Ta'lim Sabah Balau, Wawancara 15 Agustus 2018.

Tabel 6 Jumlah Umat Beragama Desa Sabah Balau

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	4872
2	Hindu	4
3	Budha	-
4	Kristen	175
5	Katolik	49

Sumber: Monografi Desa Sabah Balau 2016

b. Gotong royong

Gotong royong merupakan himbauan seluruh rukun tetangga (RT) guna melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan yang dimulai pukul 08.00 pagi hingga 11 siang. Selain meningkatkan kebersamaan antara masyarakat di desa sabah balau, gotong royong juga dapat meningkatkan kesadaran pada individu akan pentingnya kerja sama antar masyarakat untuk mencegah timbulnya wabah penyakit. kondisisarana prasarana desa sabah balau secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Data Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	JUMLAH
1	MASJID/MUSHOLLA	15 unit
2	GEREJA	02 unit
3	PURA	-
4	Vihara	-

Sumber: Monografi Desa Sabah Balau

c. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Sabah Balau

Masyarakat desa sabah balau sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh. Disini sangat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sabah Balau

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	PETANI	280
2	PEDAGANG	50
3	PNS	74
4	TUKANG	10
5	GURU	45
6	BIDAN	1
7	PERAWAT	5
8	TNI/POLRI	14
9	ANGKUTAN(SUPIR)	21
10	BURUH	345
11	PENSIUNAN	05
12	JASA PERSEWAAN	-
13	SWASTA	87

Sumber: Monografi Desa Sabah Balau

Desa Sabah Balau banyak tumbuh usaha-usaha seperti perdagangan, warung, pengrajin kayu, toko, serta perikanan dan ternak rumahan. Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon genggam (HP), akses internet membuat komunikasi lancar dan mudah. Disamping itu hampir semua keluarga telah memiliki sarana TV, VCD, Radio, bahkan smartphone dan computer menjadikan pengetahuan dan pengetahuan dan perkembangan informasi dan teknologi semakin cepat.

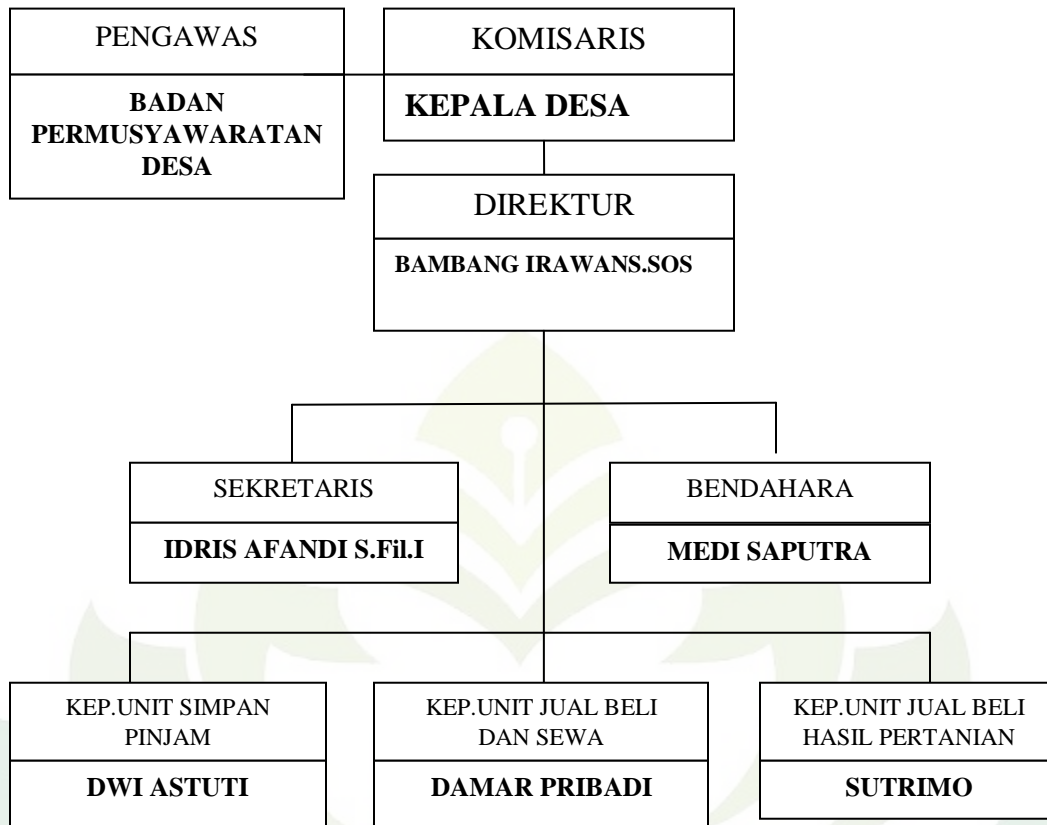
B. Gambaran Umum BUMDes Mulyo Sedoyo

1. Organisasi

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Desa Sabah Balau telah membuat Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2014 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tugas dan tanggung jawab badan pengurus dan pengelola melaksanakan kegiatan usaha dan unit-unit kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa dan melaporkan kemajuan perkembangan kepada Badan Pengawas/Komisaris dan Pemerintah Desa Sabah Balau. Pemilihan pengurus/pelaku dalam pengelola BUMDes ini kepengurusan dipilih melalui musyawarah oleh Kepala Desa, Pendamping Desa dan Ketua BPD serta SK kan oleh Kepala Desa Sabah Balau, kemudian BUMDes dibentuk dan ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2016, maka terbentuklah organisasi yang bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulyo Sadoyo.²

²Dokumentasi, Pendirian BUMDes Sabah Balau.

Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulyo Sadoyo



Sumber : Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulyo Sadoyo

2. Tujuan Pembentukan BUMDes yaitu :

- a. Meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) Desa sabah balau dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan desa sabah balau dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- b. Pengembangan potensi perekonomian di wilayah desa sabah balau untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat desa sabah balau secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- c. Menetapkan kelembagaan perekonomian desa
- d. Memberikan kesempatan usaha

e. Menciptakan lapangan kerja dan menyediakan jaminan sosial.³

3. Struktur kepengurusan

Tabel 9
Kepengurusan BUMDes Mulyo Sedoyo

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Roswildan Akib M.Pdi	Masyarakat	Badan Pengawas
2	Misyanto	Kepala desa	Komisaris
3	Bambang Irawan S.sos	Masyarakat	Direktur
4	Idris Afandi, S. Fil.I	Masyarakat	Sekretaris
5	Medi Saputra	Kaur Umum Desa	Bendahara
6	Dwi Astuti	Masyarakat	Kepala Unit Simpan Pinjam
7	Damar Pribadi	Masyarakat	Kepala Unit Jual Beli Dan Sewa
8	Sutrimo	Masyarakat	Kepala Unit Jual Beli Hasil Bumi

Sumber : Database BUMDes Sabah Balau

4. Jenis usaha BUMDes

Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha bidang antara lain:

a. Unit Simpan pinjam

Lembaga keuangan simpan-pinjam adalah salahsatu jenis usaha yang justru paling mampu menciptakan multi efek bagi ekonomi desa. Sebagai lembaga yang mampu mendukung sistem permodalan para pelaku ekonomi desa, perbankan desa bisa mendukung segala jenis usaha

³Dokumentasi BUMDes

masyarakat. Di desa manapun, di wilayah manapun, permodalan adalah salahsatu mesin penggerak perekonomian.

b. Unit Jual beli hasil bumi

Meskipun terbilang baru, BUMDes mengalami perkembangan bersama warga desa dalam satu tahun terakhir itu, mulai menunjukkan performa penjualan yang menggembirakan. Beragam produk hasil bumi seperti kopi, padi, pisang, dan lainnya banyak dicari pembeli luar desa dengan tujuan menjualnya ke daerah perkotaan.

c. Unit Sewa barang dan jasa

BUMDes menjalankan usaha Bidang Penyewaan dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Kegiatan usaha di bidang ini sudah lama berjalan di banyak sekali desa. Contoh Ide Usaha BUMDes bidang Penyewaan yakni : Penyewaan Peralatan Pertanian, Penyewaan Peralatan Peternakan, Perkakas Pesta, Dan Lain Sebagainya.⁴

⁴Dokumentasi BUMDes

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes

1. Pengelolaan BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Misyanto selaku kepala desa sabah balau mengatakan bahwa BUMDes wajib ada di setiap desa, seperti dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan undang-undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Maka berdasarkan UU tersebut, berdirinya BUMDes Mulyo Sedoyo yang dibentuk sejak tahun 2016 mampu menjadi alat untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.⁵

Meskipun BUMDes terpisah dari struktur formal pemerintahan desa, BUMDes tidak berdiri secara eksklusif. Kebijakan pendirian BUMDes harus melalui peraturan desa, yang disiapkan oleh kepala desa bersama BPD. Karena itu dalam konteks ini, BPD berwenang melakukan pengawasan umum terhadap BUMDes untuk menjaga agar BUMDes berjalan secara tanggung jawab.

⁵Misyanto Kepala Desa, Wawancara 13 September 2018.

Bapak Bambang selaku ketua BUMDes juga menerangkan bahwa kelembagaan BUMDes bersifat unik. BUMDes bukan sebagai usaha murni pemerintah, bukan usaha bersama masyarakat, bukan usaha swasta, dan bukan pula sebagai bentuk *public and private partnership*. Bapak Bambang juga menambahkan bahwa prinsip BUMDes bukanlah proyek pemerintah di desa tetapi sebagai bentuk prakarsa dan gerakan desa. Berdirinya BUMDes di desa Sabah Balau sangat membantu pendapatan desa, karena lewat BUMDes, pengelolaan potensi desa dapat termobilisasi dengan baik. Seperti adanya pemberdayaan ekonomi sebagai usaha BUMDes dalam meningkatkan usaha masyarakat.⁶

Pendanaan desa dengan BUMDes itu terpisah, sehingga dalam pengelolaan BUMDes berdiri sendiri, namun masih dalam naungan pemerintah desa. Terbentuknya BUMDes diharapkan sebagai upaya menjadikan desa Sabah Balau sebagai desa yang mandiri secara finansial, sehingga dapat membantu permodalan masyarakat. Secara pengelolaan BUMDes berdiri sendiri, namun pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes masuk ke dalam dana desa yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMDes sebagai wadah badan usaha yang menaungi usaha kecil masyarakat agar lebih optimal..⁷

⁶Bambang, Ketua BUMDes, Wawancara 25 September 2018.

⁷Observasi di BUMDes Sabah Balau

BUMDesSabah Balau dalam pengelolaannya juga langsung dilakukan oleh masyarakat setempat. Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes yang memberikan masukan dalam keuangan desa yaitu:

a. Unit Simpan Pinjam.

Bentuk simpanan yang ada yaitu tabungan masyarakat Sabah Balau dan tabungan usaha mikro. Tabungan ini diadakan dengan tujuan untuk memberi dukungan kepada masyarakat dalam meningkatkan usahanya agar tidak kehabisan modal, serta membantu masyarakat untuk menabung untuk kebutuhan mendatang, seperti kebutuhan sekolah. Dalam aurannya tidak ada ketentuan batas simpanan, tetapi batas pinjaman antara 1.500.000 s/d 10.000.000., Kedua bentuk tabungan tersebut dikelola oleh BUMDes dengan cara memutar kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya tabungan membantu masyarakat tidak kesulitan mendapatkan modal.⁸

Hal diatas juga ditegaskan oleh Ibu Desi bahwa: Melalui simpanan tersebut, saya tidak kesulitan mencari modal lagi dan karena selain bisa menambah modal usaha, saya juga bisa menabung. Sehingga usahanya bisa dikontrol dengan baik pemasukannya. Dengan masyarakat menabung, masyarakat disini yang punya usaha juga membantu dengan

⁸Dokumentasi BUMDes

meminjam modal dari tabungan tersebut, yang memang sudah disepakati bersama.⁹

Berdasarkan hasil interview dan observasi juga, masyarakat banyak tertarik dengan unit produk dan jasa simpan pinjam. Selain membantu masyarakat untuk menabung juga membantu masyarakat untuk memiliki tekad memulai usaha.

Untuk dapat membebaskan masyarakat Sabah Balau dari jeratan rentenir tentunya bukanlah hal yang mudah terlebih lagi masyarakat masih menganut sistem menabung tradisional dimana masyarakat masih belum begitu familiar dengan bank. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat para pengurus dan pengelola BUMDes Sabah Balau untuk memperkenalkan BUMDes sebagai sebuah lembaga simpan pinjam terpercaya dengan menyimpan uang sebesar Rp. 2.000.000

Sedangkan untuk pinjaman terus disalurkan kepada para pengusaha kecil, petani, dan pedagang untuk mengembangkan usaha mereka dengan suku bunga pinjaman sebesar 2% per bulan. Selain membantu para pengusaha kecil, BUMDes Sabah Balau juga turut membantu pengusaha yang skala usahanya sudah lebih besar untuk mengajukan ke BUMDes.¹⁰

⁹Desi, Anggota BUMDes, wawancara 4 september 2018.

¹⁰Observasi di BUMDes Sabah Balau

b. Jual beli hasil bumi

Anggota BUMDes awalnya kesulitan dalam menggerakkan usaha dalam satu badan usaha di desa. Koperasi Unit Desa (KUD) tidak berkembang, maka diperlukan terobosan dalam meyakinkan masyarakat. "Misal kita juga bantu pengolahan, agar hasil bumi kita tidak dijual secara mentah," kata sekretaris BUMDes.¹¹

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh masyarakat desa Sabah Balau untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. BUMDes berfungsi sebagai agen, supplier & distributor hasil pertanian & perkebunan. Para petani desa Sabah Balau merupakan pelaku produksi hasil bumi, kemudian hasil bumi tersebut diantaranya padi, jagug, biji kopi, sayuran semacam cabai dan singkong, disebabkan terdiri dari 476,5 Ha diperuntukan sawah dan ladang. Singkong tidak dijual secara mentah tetapi diolah lagi menjadi kelanting, sehingga terbentuk juga kelompok industri kelanting. Jadi bukan lagi tengkulak yang ingin mencari keuntungan semahunya tetapi kini dikelola oleh BUMDes. Secara teknis menggunakan system bagi hasil antara petani dan pedagang.

Kehadiran BUMDes mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Meskipun belum seluruhnya berkembang, Pemerintah

¹¹Dokumentasi BUMDes

menilai besarnya potensi yang telah ditampilkan bumdes. Dengan upaya itu, dapat menjadi acuan pemerintah untuk pengembangan ke depan."Inilah yang namaya pembangunan dari desa itu, jadi potensi desa bisa dioptimalkan langsung masyarakat," Ketua BUMDes.¹²

c. Unit sewa barang dan jasa

Berdasarkan peraturan perundang-undangan no 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan modal. Aset, jasa pelayanan dan usaha tersebut untuk kesejahteraan masyarakat desa.Salah satunya adalah jasa penyewaan tarup (tenda pesta).¹³

Sebagai jasa sewa tenda sering sekali mendapatkan pertanyaan dari para calon pelanggan mengenai cara penghitungan biaya sewa tenda, sebenarnya penghitungannya sangat mudah sekali yaitu tinggal kalikan saja panjang kali lebar dan hasilnya dikalikan harga tenda tersebut. Misalkan Anda membutuhkan tenda ukuran 10 m x 10 m, berarti itu panjangdi kali lebar jadi $10 \times 10 = 100\text{m}^2$. Jadi hitungannya $100\text{m}^2 \times 50.000$ (tenda dekorasi VIP) = jadi total untuk tendanya 5.000.000, sedangkan untuk pemakain bahan dekor kain baru untuk tenda plafon dekorasi VIP, dikenakn biaya 15.000/m². Jika ada yang menyewa maka akan ada penghasilan BUMDes dari

¹² Ketua BUMDes, Bambang Irawan S.Sos

¹³ Observasi diBUMDes Sabah Balau

sumber unit Sewa Barang dan Jasa. Pelanggan masih seputar desa Sabah Balau. Jika pelanggan ingin menyewa hubungi pihak pengurus BUMDes Mulyo Sedoyo.

“Harapannya masyarakat kampung Sabah Balau dapat menggunakan tarup tersebut apabila diperlukan tanpa harus menggunakan tarup dari luar desa. Hasil sewa tarup nantinya akan menambah masukan uang kas Desa.” Bendahara BUMDes.¹⁴

2. Kegiatan Usaha BUMDes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Usaha –usaha dalam pendapatan ekonomi masyarakat Desa Sabah Balau melalui BUMDes dilakukan melalui beragam kegiatan adalah sebuah upaya melakukan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan – pelatihan dilakukan sebagai penunjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Desa Sabah Balau yang mandiri, kreatif, kompetitif, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Usaha peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu mengembangkan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program BUMDes, yaitu:

a. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Sabah Balau adalah untuk memberikan informasi mengenai berdirinya BUMDes. Kegiatan penyuluhan ini juga dilakukan dalam bentuk

¹⁴ Wawancara Medi Saputra, Bendahara BUMDes

sosialisasi unit usaha yang akan dikembangkan di Desa Sabah Balau kepada masyarakat agar masyarakat ikut serta merealisasikan unit usaha tersebut.

Bapak Medi mengatakan bahwa penyuluhan ini dilakukan agar unit usaha yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bisa membantu mengembangkan ekonomi masyarakat.¹⁵

b. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Desa Sabah Balau. Melalui pelatihan kemampuan secara *hard skill* dan *soft skill* masyarakat akan terlatih, sehingga menjadikan masyarakat yang terampil, mandiri dan kreatif. Dalam hal ini, kegiatan pelatihan seperti dalam kegiatan ekonomi dan sebagainya yang dilakukan dengan cara kerja sama dengan organisasi masyarakat seperti kelompok Tani.

Ibu Desi mengatakan bahwa, dengan adanya pelatihan mampu meningkatkan keterampilan para anggota atau masyarakat untuk bisa menghasilkan penghasilan tambahan dengan cara membuka usaha dari hasil kegiatan pelatihan tersebut.¹⁶

Berdasarkan data kegiatan desa, pelatihan kewirausahaan dilakukan pada bulan April 2016. Sampai pada akhir tahun 2016 sudah

¹⁵Medi, Wawancara 10 September 2018.

¹⁶Desi Wawancara 4 September 2018.

3 kali dilakukan. Kegiatan ini diikuti sebanyak 64 orang secara umum. Pelatihan dibimbing dan di bina oleh pelatih dari lokal yang sudah bekerjasama dengan pihak Kelompok Tani, KWT dan lainnya. Awal kegiatan ini adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan kewirausahaan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya masyarakat diberikan pelatihan pengembangan skil keterampilan masyarakat dan edukasi masyarakat, kegiatan ini lebih mengoptimalkan praktek masyarakat sehingga masyarakat mudah mengaplikasikannya untuk dapat dijadikan pengembangan usaha masyarakat setempat.¹⁷

c. Peminjaman Modal

Cara pengembangan usaha dan pengelolaan dan pinjaman yang diberikan oleh BUMDes untuk masyarakat adalah dana dari Desa yang merupakan hasil dari dan terkumpul dari setiap unit usaha yang dimilikinya, kemudian ada juga modal dari BUMDes, produk masyarakat yang buat maka hasilnya dibagi dua. Dalam regulasinya tidak ada ketentuan batas simpanan, tetapi batas pinjaman antara 1.500.000 s/d 10.000.000., kebanyakan nasabah meminjam dengan nominal lima juta rupiah. Kedua bentuk tabungan tersebut dikelola oleh BUMDes dengan cara memutar kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya tabungan maka bermanfaat membantu

¹⁷Dokumentasi database BUMDes 2016.

masyarakat tidak kesulitan mendapatkan modal serta masyarakat meningkat ekonominya. Nominal peminjaman tergantung dengan prospek usaha yang akan dijalankan. Untuk dikembangkan melalui usaha kecil menengah.

D. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemberdayaan Ekonomi

Indikator keberhasilan BUMDes Mulyo Sedoyo dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang dimulai sejak tahun 2016 adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah actor utama dalam meningkatkan menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian Desa. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes meliputi:

1. Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dimulai pada tahap keikutsertaan masyarakat dalam membentuk BUMDes sebagai badan otonom Desa yang mewakili wewenang memobilisasi kegiatan usaha masyarakat. Partisipasi masyarakat selanjutnya dalam perencanaan adalah kehadiran masyarakat dalam sosialisasi dan perencanaan kegiatan BUMDes. Berdasarkan hasil observasi 2 september 2018, masyarakat mendukung dan merespon dengan baik berdirinya BUMDes.

Seperti yang dikatan oleh Bapak Bambang, menurutnya dalam proses pendirian dan perencanaan kegiatan BUMDes masyarakat dilibatkan untuk

ikut serta dalam rapat pembentukan yang dilakukan di Balai Desa. Dalam sosialisasi untuk perencanaan unit usaha yang akan dikelola BUMDes masyarakat dilibatkan baik ibu – ibu maupun bapak – bapak yang memang mereka memiliki peran dalam kegiatan ekonomi.¹⁸ Pernyataan Bapak Bambang itu juga diperkeras oleh Bapak Medi bahwa BUMDes akan untuk dapat membantu masyarakat dalam pengembangan usaha nya, kalau masyarakat kurang peduli tidaka akan terlaksana. Pada awal pembentukan masyarakat sangat antusias mendukung sekali, samapai sekarang juga sangat mendukung. Unit usaha yang sudah dikelola dengan baik oleh BUMDes itu juga merupakan hasil musyawarah bersama masyarakat, karena memang dengan adanya kegiatan ekonomi masyarakat lebih terbantu dalam usahanya.

2. Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan dilakukan setelah perencanaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Seperti masyarakat mengembangkan usaha nya lewat modal yang diberikan oleh BUMDes itu sudah termasuk bentuk partisipasi membantu merealisasikan BUMDes.

Hal itu ditunjang oleh pendapat salah seorang sekretaris Desa Bapak Idris Afandi S.Fil.I, menurutnya pelaksanaan dilakukan setelah selesai perencanaan dan kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibantu oleh pengurus BUMDes. Masyarakat ikut serta

¹⁸Bambang, Wawancara 5 September 2018.

dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh BUMDes yang tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat.¹⁹

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dibutuhkan dalam kegiatan BUMDes agar semua unit usaha yang di bentuk BUMDes berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya merupakan tugas dan kewajiban pengurus dan anggota BUMDes serta Pemerintah Desa setempat. Kalau tidak ada kegiatan ini, unit usaha yang didirikan akan berhenti dan bisa merugikan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu juga, peran masyarakat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting baik dari masyarakat Desa Sabah Balau diluar anggota BUMDes maupun anggota BUMDes. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Damar bahwa masyarakat memang benar harus dilibatkan dalam mengawasi segala kegiatan Desa, apa lagi saat ini, dana Desa akan sangat tinggi, kalau masyarakat tidak mengawasi dengan baik, takutnya ada penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Desa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi adalah melaporkan setiap gerak pengurus BUMDes dan Aparat Desa yang kurang baik misalnya, ikut dalam rapat desa, mengamati perkembangan pembangunan desa dan sebagainya.²⁰

¹⁹Idris Afandi, Wawancara 6 September 2018.

²⁰Damar, Wawancara 3 September 2018.

BAB IV

ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA SABAH BALAU MELALUI BUMDES MULYO SEDOYO

A. Pemberdayaan Ekonomi Melalui BUMDes

Pada bab ini dipaparkan analisis dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dilihat adanya, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes yang berjalan baik. Berdasarkan hasil lapangan, hadirnya BUMDes memberi kontribusi yang baik bagi perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemasukan tambahan Desa berasal dari kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola oleh BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulyo Sedoyo merupakan salah satu Lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat, sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya.

Menurut UU No.6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara republic Indonesia. Dengan demikian, desa perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah pusat, karena pada dasarnya kemajuan bangsa berawal

dari pembangunan desa yang baik. Pembangunan desa sudah sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sabah Balau dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam maju kembangnya kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan berlakunya UU tentang Desa. Seiring berjalannya waktu, desa menjadi prioritas utama dalam hal pembangunan, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur yang arahnya pada pengembangan potensidesa, sehingga dana kucuran untuk desa sangat tinggi. Pada hakikatnya hal demikian sangatlah baik, namun pada nyatanya monitoring pemerintah desa terhadap dana desa tersebut kurang baik, sehingga banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa.

Selanjutnya, demi mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah pusat juga membuat kebijakan baru tentang wajib adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa sebagai upaya membantu unit usaha kecil masyarakat mengelola dengan baik. BUMDes juga hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha

Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Salah satu desa yang memiliki BUMDes adalah Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. BUMDes Desa Sabah Balau diberi nama Mulyo Sedoyo, yang berdiri pada tahun 2016.

Berdasarkan teori dalam BAB II telah di bahas bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini juga merupakan bentuk dari pembangunan desa. Upaya peningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bidang ekonomi yang menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dengan adanya BUMDes diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun tidak banyak BUMDes yang hadir peran dan kontribusinya sesuai dengan visi dan misi BUMDes itu sendiri.

Berdasarkan dari hasil penelitian, BUMDes Desa Sabah Balau termasuk salah satu BUMDes yang aktif. Selama dua tahun terakhir ini, bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes yaitu:

1. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Jual Beli Hasil Bumi
3. Unit Sewa Barang Dan Jasa

Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang memobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang,

karena proses tersebut mengkombinasikan sumberdaya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa lainnya. Maka dari itu pemberdayaan ekonomi masyarakat butuh proses dan butuh tindakannya dan kolektif masyarakat untuk sampai pada kondisi yang baik. Sedangkan usaha pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui program BUMDes, yaitu:

1. Penyuluhan

Dilihat dari kebermanfaatan, kegiatan ini harus *continue* dan rutin dilakukan agar masyarakat mengetahui dan dapat ikut serta merealisasikan proses pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menganalisis bahwa kegiatan penelitian ini dilakukan dengan sangat baik, karena masyarakat sudah mengetahui keberadaan BUMDes, sehingga kegiatan dan segala informasi tentang BUMDes banyak diketahui oleh masyarakat wilayah yang dekat ataupun yang berada jauh dari kantor BUMDes. Karena BUMDes berdiri sesuai dengan inisiatif dan kebutuhan masyarakat, kedepannya BUMDes diharapkan dapat berjalan lebih baik lagi.

2. Pelatihan Usaha

Seperti halnya kegiatan penyuluhan, kegiatan pelatihan usaha ini diikuti oleh masyarakat desa sabah balau yang dimana warga nya sangat antusias mengikuti pelatihan usaha, karena sasarannya masyarakat, jadi masyarakat harus seluruhnya dilibatkan. Pelatihan ini dilakukan harus

mengutamakan bagaimana masyarakat punya usaha sendiri-sendiri, contohnya setiap dusun memiliki usaha yang berbeda-beda. Kegiatan ini harus dilakukan kembali agar masyarakat bisa berdaya dan mandiri.

3. Permodalan

Permodalan dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah. Dengan adanya unit simpan pinjam maka masyarakat juga bisa menjadikan modal untuk membantu masyarakat mengembangkan usahanya.

BUMDes harus menyisihkan secara khusus dana yang terkumpul untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena kalau sudah masuk dalam keuangan Desa, Dana tersebut pasti digunakan untuk kebutuhan fisik desa, dan masyarakat kembali tidak diperhatikan kegiatan usahanya.

Permodalan yang dilakukan oleh BUMDes harus di monitoring kembali agar masyarakat yang membutuhkan permodalan dalam mengembangkan usahanya bisa terbantu, sehingga BUMDes tidak akan mati.

B. Partisipasi Masyarakat Desa Sabah Balau Melalui BUMDes

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan mampu menjadi

motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang dikelola secara baik dan profesional. Adanya BUMDes merupakan upaya agar setiap program pemerintah sifatnya *Top Down* berubah menjadi *Bottom Up*, dimana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan setiap program. Karena dasar pemikiran terbentuknya BUMDes adalah BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, sertamen dasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes, yaitu:

1. Perencanaan

Padatahapini, partisipasi masyarakat masih sangat kurang sehingga semua program yang dijalankan dari BUMDes ditentukan oleh Aparat Desa setempat. Namun terjadi karena kurangnya sosialisasi pengurus BUMDes dengan masyarakat setempat.

Perencanaan yang baik adalah melibatkan masyarakat agar dibentuknya suatu program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perencanaan ini, masyarakat harus tau secara detail tujuan dalam langkah – langkah yang akan dilakukan. Apalagi BUMDes adalah Badan usaha yang saat ini wajib ada di setiap desa, jika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya, adanya BUMDes itu maka akan sia-sia.

2. Pelaksanaan

Setiap program sasaran utamanya adalah masyarakat setempat. Jika masyarakat tidak ikut serta, kegiatan pembangunan usaha masyarakat tidak akan terealisasi.

Pada tahap ini, 50 % masyarakat Desa Sabah Balau sudah mulai ikut serta mensukseskan unit usaha yang berdiri. Masyarakat banyak yang menggunakan jasa dan produk yang dimiliki BUMDes.

3. Monitoring Dan Evaluasi

Mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan Desa adalah kewajiban seluruh masyarakat Desa Sabah Balau. Maka partisipasi masyarakat dalam monitoring juga dibutuhkan agar kegiatan yang dilakukan bisa berlanjut dan tidak mengalami penyimpangan. Pada tahap ini masyarakat belum secara optimal, masyarakat belum mengerti bagaimana pengelolaan BUMDes yang sebenarnya. Sehingga masyarakat tidak mengetahui setiap dana desa yang keluar, apa saja pengeluaran Desa, dan sampai pada pemasukan Desa dari setiap unit usaha BUMDes, masyarakat kurang paham. Hal itu karena, setiap rapat, informasinya kurang sampai kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pengembangan ekonomi masyarakat masih kurang baik, sehingga pengelolaan unit usaha BUMDes masih sifatnya *TopDown* dan masyarakat hanya mengetahui ketika akan diadakannya pelaksanaan dan pendirian beragam usaha.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini berupa poin-poin yang menjawab dari rumusan masalah dalam bab terdahulu yakni tentang:

1. Fungsi BUMDes Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

BUMDes Sabah Balau berfungsi meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang didirikan oleh BUMDes memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta mampu membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. BUMDes memberikan motivasi dan stimulus masyarakat dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga.

Pengelolaan BUMDes Desa Sabah Balau dilakukan secara baik, dana yang terkumpul masuk kedalam kas desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik. Adapun berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Sabah Balau Mulyo Sedoyo memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan bekerja sama dengan BUMDes. BUMDes

Memberi lapangan kerja bagi masyarakat, usaha masyarakat termobilisasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui BUMDes.

Telah diketahui jumlah sebanyak 64 orang telah tumbuh jiwa partisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes Mulyo Sedoyo. Adanya BUMDes Sabah Balau merupakan salah satu upaya agar setiap program pemerintah yang sifatnya *Top Down* berubah menjadi *Bottom Up*, dimana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan setiap program hingga pada tahap evaluasi secara mandiri.

Berdasarkan dari hasil penelitian, BUMDes Desa Sabah Balau termasuk salah satu BUMDes yang aktif. Selama dua tahun terakhir ini, masyarakat telah berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BUMDes pada subsektor Unit Simpan Pinjam, Unit Jual Beli Hasil Bumi, Unit Sewa Barang dan Jasa.

Keterlibatan masyarakat pada program BUMDes Sabah Balau Mulyo Sedoyo dampaknya mereka mampu melakukan perencanaan program yang berhasil, mulai menemu kenali potensi lokal dan menentukan tujuan, membaca situasi dan kondisi, memiliki pengetahuan, serta pengalaman dengan struktur sosial masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang bisa peneliti ambil:

1. Dalam perencanaan program dan membentuk unit usaha harus melibatkan masyarakat, agar masyarakat bisa berpartisipasi dengan baik dalam pengambilan kebijakan dari pengelolaan BUMDes
2. Untuk pemerintah desa, buatlah kondisi desa yang transparan dan terbuka, sehingga perencanaan program, anggaran Desa masyarakat mengetahui agar tidak bersifat Top Down dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini bisa dilakukan dengan rutin melakukan musyawarah desa.
3. Untuk pengurus dana nggota BUMDes buatlah Cluster kewirausahaan bagi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat di setiap wilayahnya agar pengembangan ekonomi masyarakat berjalan terpadu dan merata. Bukan hanya dirasakan pada wilayah yang dekat dengan kantor BUMDes saja. Bukanlah unit usaha yang sifatnya kontinyu, dan berikan pelatihan kewirausahaan masyarakat secara berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amrullah, 1989. *Perspektif Islam Dalam Pembangunan Bangsa*, Yogyakarta
- Alfiri, 2011. *Community Development*, Yogyakarta :PustakaPelajar.
- AnwasOos M. Anwas, *PemberdayaanMasyarakat di Era Global*, (Bandung, CV Alfabeta, 2013)
- CholidNarbukodanAchmadi Abu, *metodepenelitian*, (Jakarta: BumiAksara, 1997)
- Hendro D. Puspito,Oc, *SosiologiSistematika*, (Yogyakarta, PenerbitKarlus. 1989)
- Hikmat Harry, *StrategiPemberdayaanMasyarakat*, (Bandung, Humaniora,2006),
- HusainiUsmanHusainidanPurnomoSetiadi Akbar, *MetodePenelitianSosial*, (Jakarta :BumiAksara, 2001)
- HusainiUsman, *Metodepenelitiansosial*, (Bandung :BumiAksara 1995)
- Ife Jim, *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*. (Meulbore : Addison Wesley Longman, 1997)
- Juliansyah Noor Dan Ahmad,*MetodePenelitian : Skripsi, Tesis, Desertasi, Dan KaryaIlmiah*,(Jakarta : Kencana, 2013)
- KartonoKartini, *PengantarMetodeReseach* Cet. II, (Bandung: MasdarMaju, 1996)
- Koetjaraningrat, *Metode-metodePenelitianMasyarakat*, (Jakarta:Pt, GramediaPustaka)
- MardiantokTotok, SoebiatoPoerwoko, *PemberdayaanMasyarakatDalamPerspektifKebijakan Public*, (Bandung :Alfabeta, 2015)
- PrijonoOnny S., A.M.W Pranaka, *MengenalPemberdayaan: Konsep, KebijakandanImplementasi*, (Jakarta: CSIS,1996)
- SjafariAgus, *Kemiskinan Dan PemberdayaanKelompok*, Yogyakarta: GrahaIlmu
- SoehartonoIrawan “*MetodePenelitianSosial*”, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008)
- Sudarmayanti, HidayatSyarifudin, *MetodelogiPenelitian*, (Bandung: CV,Mandar Maju, 2011)
- Sugiyono, *MetodePenelitianKombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung, Alfabeta CV, 2013)

Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2010)

Sumodiningrat Gunawan, *Memberdayakan Masyarakat*, (Jakarta: Pena Kencana Nusadwipa, 1996)

Sumpeno Wahjudin, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (Aceh: The World Bank, 2010)

Suwarno, *Teori Sosiologi*, (Bandar Lampung : Penerbit Universitas Lampung, 2012),

Syamsudin Amir, 2014. UUD Republik Indonesia no. 6 tentang Desa

Yusanto M. Ismail dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor : Al-Azhar Press, cet 2, 2011)

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (BUMDes) (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan desa

Journal E. 2013 yang ditulis oleh Dantika Ovi Era Tama Dan Yanuardi, M. Siyang berjudul *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*

Manikum Angger Sekar, 2010. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009* Yogyakarta

Qodir Abdul. 2011. *Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya)*. Jakarta : 2011

Septian Agung Wijanarko. 2012. yang berjudul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemilagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2012*. Semarang

Yuliwati Hani 2007 *pemberdayaan ekonomi buruh gedong wanita, jumlah masyarakat Islam populasi* Yogyakarta

Anggara Dita Rusiana, *BUMDes Motor Penggerak Desa*, ditulis pada tanggal 24 Januari 2018, terdapat di <http://ekbis.sindonews.com/read/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-desa>, diakses pada tanggal 5 Februari 2018.

<http://www.presidentri.go.id/desa/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bundes.html>, diakses pada tanggal 6 februari 2018.

Kementrian Negara, “*Perubahan Paradigm Pembangunan Daerah Tertinggal*” terdapat di <http://www.kemenegpdrt.go.id/>, diakses pada tanggal 6 februari 2018

Totok Mardikantodan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Persepektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.

